

Analysis Of The Effect Of Regional Infrastructure Development On Poverty Levels In Southeast Maluku Regency

Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Maluku Tenggara

Arsad Matdoan^{1*}, Amin Ramly², Evin R. Tamher³, Muhammad R. A. Ingratubun⁴

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pattimura, Indonesia^{1,2,3,4}

arsadmatdoanm@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to see and analyze the effect of Road, Education, Health and Telecommunication infrastructure development on the poverty rate in Southeast Maluku Regency. This research uses a quantitative approach with Multiple Linear Regression analysis methods and data processing using the Eviews application. This study used secondary data obtained from related agencies. The results of this study show that Road Infrastructure and Telecommunication Infrastructure have a negative and significant effect on regional poverty levels in Southeast Maluku Regency. This is evidenced by the results of the t-statistical test which shows a coefficient value of -4.126048 with a probability value of 0.0091 in Road Infrastructure and Telecommunication Infrastructure obtained t-statistical test results which show a coefficient value of -3985471 with a probability value of 0.0105. Meanwhile, Education Infrastructure and Health Infrastructure do not have a significant effect on the poverty rate in Southeast Maluku Regency. This is evidenced by the t-statistical test which shows a coefficient value of 1.044468 with a probability value of 0.3441 in Education Infrastructure and Health Infrastructure obtained t-statistical test results that m show a coefficient value of 0.7993 with a probability value of 0.0105.

Keywords : *poverty, infrastructure, education, health*

1. Pendahuluan

Tatanan kehidupan masyarakat sejahtera adalah tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan didalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional diberbagai sektor ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan perkapita penduduk dan menurunnya angka kemiskinan (Mahadiansar et al., 2020). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ditempuh melalui pelaksanaan pembangunan sesuai karakteristik daerah dan sumberdaya yang dimiliki. Pengelolaan sumberdaya yang efektif berkontribusi positif terhadap tujuan pelaksanaan pembangunan.

Ukuran kesejahteraan masyarakat suatu negara atau daerah dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kemiskinan penduduk di negara atau daerah tersebut (Bustamam et al., 2021). Semakin rendah tingkat kemiskinan, menunjukkan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemiskinan, mencerminkan semakin rendah kesejahteraan masyarakat yang ada di negara atau daerah tersebut. (Sari, 2021) menyatakan bahwa kemiskinan ialah standar hidup yang rendah yang dimanifestasikan secara kualitatif dan kuantitatif dengan pendapatan yang rendah, perumahan yang tidak layak huni, kesehatan yang buruk, usia harapan hidup yang singkat, angka kematian bayi yang tinggi, bekal pendidikan yang kurang dan peluang mendapatkan pekerjaan yang rendah.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang harus ditangani secara serius yang melibatkan para pemangku kepentingan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dilandasi kebijakan pembangunan ekonomi sesuai kekhasan daerah. (Siwu, 2019) mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola setiap sumber daya yang dimiliki dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk dapat lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan dapat memberikan rangsangan terhadap perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Secara umum, definisi ini menekankan pada proses kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi termasuk didalamnya adalah penyediaan infrastruktur, baik infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan, infrastruktur pemerintahan, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pendidikan dan Infrastruktur kesehatan. (Okta Sriwahyuni, 2021) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, pembuangan limbah, transportasi, penyediaan listrik dan pelayanan lainnya guna memfasilitasi tujuan ekonomi dan sosial. Selain itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Infrastruktur Jalan merupakan sarana penunjang kegiatan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sosial ekonomi (Iriyena et al., 2019). UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, menegaskan bahwa jalan merupakan bagian dari sarana transportasi memiliki peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Selanjutnya untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, gedung perpustakaan, gedung laboratroum, lapangan olahraga dan prasarana pendukung lainnya sangat menunjang proses penyelenggaraan pendidikan yang baik yang pada gilirannya akan mencetak lulusan yang berkualitas.

Selain itu dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang baik, pemerintah daerah telah membangun infrastruktur kesehatan berupa gedung puskesmas, pustu, rumah medis dan paramedis serta fasilitas lainnya. Penyediaan prasarana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, baik pelayanan pada aspek promotif, aspek preventif, aspek kuratif maupun aspek rehabilitative (Hasrillah et al., 2021).

Infrastruktur lain yang sangat vital dalam menunjang aktivitas masyarakat adalah infrastruktur telekomunikasi. Akses komunikasi dan informasi yang cepat berbasis teknologi digital bukan lagi merupakan keinginan, akan tetapi menjelma menjadi sebuah kebutuhan yang bersifat mendesak. Dengan hadirnya infrastruktur telekomunikasi, masyarakat dengan mudah berkomunikasi dan mengakses informasi secara cepat dan up to date dalam kehidupan keseharian melalui telepon seluler (Mustari, 2023).

Meskipun pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi terus dibangun, direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan fisik setiap tahun, namun tingkat kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara masih relatif tinggi dibanding 6 (enam) kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku dan mengalami penurunan selama kurun waktu 10 tahun hanya sebesar 3,87 persen atau rata-rata turun sebesar 0,45 persen per tahun.

2. Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

(Jacobus et al., 2021) menyatakan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan aspek lainnya, sedangkan (Djaenal et al., 2021) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Lebih lanjut Kartasmita mengemukakan bahwa masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan (Ahmad & Bonso, 2020) yang mengatakan bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Gambaran kemiskinan dapat dilihat sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berteduh, ketidakmampuan mendapatkan pengobatan secara medis, ketiadaan akses untuk bersekolah dan buta huruf, pengangguran, kekhawatiran tentang masa depan bahkan kehidupan pada suatu hari berikutnya. Potret kemiskinan lainnya adalah kehidupan tidak sehat yang disebabkan oleh air yang kotor, ketidakberdayaan, kehilangan aspirasi dan kebebasan. Kemiskinan yang dipahami memiliki konsep multidimensional mencakup seluruh indikator kesejahteraan, mempunyai banyak wajah, yang berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain.

(Sumargo & Simanjuntak, 2019) mengemukakan bahwa kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan multidimensi. Berbagai kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut diarahkan pada empat fokus kebijakan yang sampai saat ini masih dijalankan oleh pemerintah. Bappenas tahun 2002 dalam Arsyad (2016) kemiskinan diartikan sebagai suatu situasi dan kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak mampu menjalankan hidupnya sesuai taraf yang dianggap manusiawi.

Infrastruktur

(Sulis, 2022) infrastruktur merupakan pelayanan masyarakat dalam skala besar misalnya jalan raya, telepon, listrik, kereta api, sistem penerbangan, air dan lain-lain. Semua ini diperlukan untuk mendukung aktifitas perekonomian terutama perumahan, perdagangan dan pertanian. Sarana umum ini biasanya disediakan oleh pemerintah akan tetapi karena minimnya anggaran maka sarana umum ini Sebagian dibangun oleh swasta.

Infrastruktur sebagai fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, pembuangan limbah, transportasi, penyediaan listrik dan pelayanan lainnya guna memfasilitasi tujuan ekonomi dan sosial (Pane et al., 2020).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung fungsi sistem ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai struktur-struktur, fasilitas, peralatan dan instansi yang dibangun dan dibutuhkan guna berfungsinya sistem sosial dan ekonomi masyarakat (Agustin & Hariyani, 2023).

Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan suatu infrastruktur yang berkaitan dengan darat dalam bentuk apapun yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan yang dibangun untuk melengkapi dan untuk lalu lintas (Dewi et al., 2020). Jalan dibagi menjadi medan jalan, wewenang pembina jalan, kelas jalan dan menurut fungsinya. Jalan menurut fungsinya dibagi menjadi: jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jauh, dengan kecepatan tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul dengan ciri perjalanan jarak menengah dan kecepatan menengah jalan masuknya pun dibatasi. Jalan lokal yaitu jalan yang dilalui angkutan lokal dengan ciri kecepatan rendah dan jumlah

jalan msuk tidak dibatasi. Artiya jalan merupakan media transportasi darat yang meliputi seluruh jalan.

Infrastruktur Pendidikan

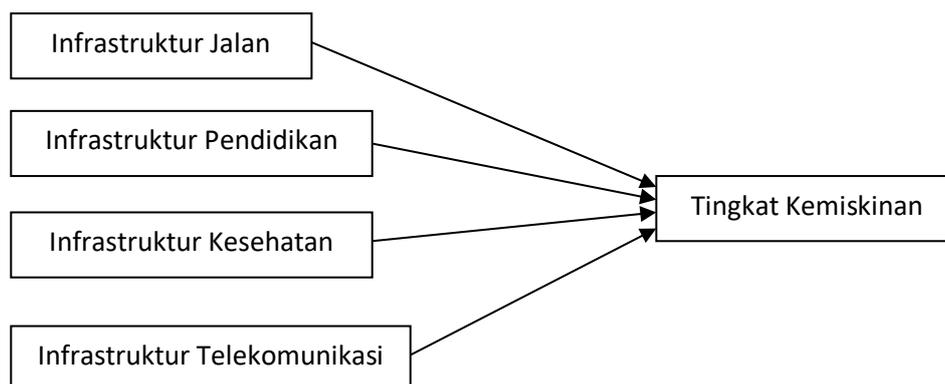
Pendidikan dipandang sebagai suatu usaha sadar yang berkelanjutan dan terencana untuk meningkatkan kecerdasan berpikir, kepribadian yang ulet, akhlak yang mulia dan ketrampilan yang memadai (Laros & Tuhuteru, 2022). Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan lain yang dibutuhkan dirinya, bangsa dan negara.

Infrastruktur Kesehatan

Menurut (Febriana & Nurdiansyah, 2021), kesehatan dapat dilihat dari produktivitas seseorang menjalankan kegiatannya sehari-hari seperti sekolah, kuliah, dan kegiatan sosial bagi yang lanjut usia. Menurut Undang-undang Nomor. 36 tahun 2009, Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat baik secara fisik maupun spiritual dan sosial yang memungkinkan orang untuk hidup produktif dan ekonomis.

Infrastruktur Telekomunikasi

Salah satu infrastruktur yang akan menjadi fokus dari penelitian ini ialah infrastruktur telekomunikasi. Istilah telekomunikasi muncul setelah terjadinya perpaduan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi telokomunikasi ialah teknologi yang menggabungkan computer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang menghantarkan suara, video dan data (Purba, 2019).



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang berupa angka-angka sebagai alat untuk menganalisis apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif ialah sebuah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur secara statistik atau dengan cara kuantifikasi (pengukuran) lainnya (Ali, 2022).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

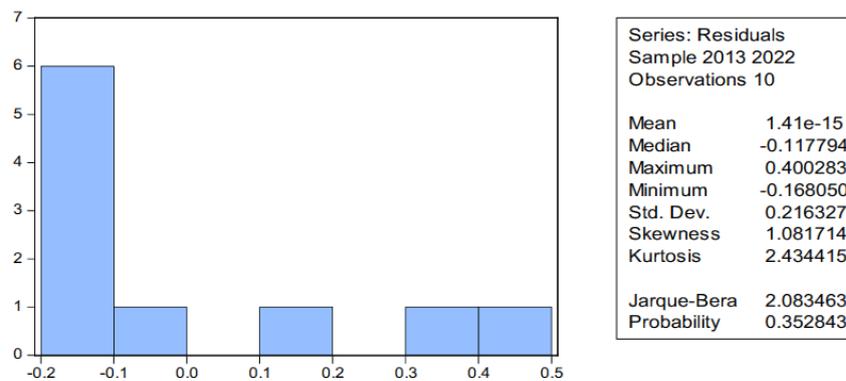
4. Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Untuk melihat kebaikan data dan memperoleh persamaan regresi yang valid untuk melakuka prediksi, maka pada penelitian ini akan dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalistas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarque Bera Test, dengan hipotesis nol (H0) dari uji Jarque Bera ini adalah data berdistribusi normal dan hipotesis alternatifnya (Ha) adalah data tidak berdistribusi normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, nilai Jarque-Bera sebesar 2.083463 dengan p-value sebesar 0.352843 lebih besar dari nilai α 0.05 (P-Value > 0.05). maka (Ho) diterima, yang artinya bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variable independent. Uji Multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan metode Variance Inflation Factors test. jika nilai VIF dari masing-masing variable independent < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.190847	22.65645	NA
X1	0.015673	14.05268	3.057920
X2	0.011577	29.96661	1.484702
X3	0.000893	2.407487	1.237317
X4	0.021339	32.96723	3.417150

Sumber: Hasil Output Eviews, 2023

Hasil uji multikolinieritas diatas menunjukkan nilai VIF pada variable X1 sebesar 3.057920, variable X2 sebesar 1.484702, variable X3 sebesar 1.237317 dan variable X4 sebesar 3.417150 dimana nilai dari ke 4 variable tersebut < 10. Artinya bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Breusch-Godfrey serial correlation LM test.

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	94.97324 Prob. F(2,3)	0.0019
Obs*R-squared	9.844516 Prob. Chi-Square(2)	0.0073

Sumber: Hasil Output Eviews, 2023

Berdasarkan hasil dari Breusch-Godfrey serial correlation LM test, diperoleh nilai probability Chi-Square yaitu 0.0073 yang berarti $< \alpha 0.05$ sehingga data yang digunakan lolos dari masalah autokorelasi atau asumsi autokorelasi tidak terpenuhi.

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.157807 Prob. F(4,5)	0.9511
Obs*R-squared	1.120942 Prob. Chi-Square(4)	0.8909
Scaled explained SS	0.200987 Prob. Chi-Square(4)	0.9953

Sumber: Hasil Output Eviews, 2023

Hipotesis nol (H_0) dari uji Chi-Squared ini adalah tidak ada heteroskedastisitas di model regresi dan hipotesis alternatifnya (H_a) adalah adanya gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan-Godfrey, diperoleh hasil berupa nilai probabilitas Chi-Squared sebesar 0.8909 lebih besar dari taraf signifikansi ($0.8909 > 0.05$), yang artinya menerima (H_0) atau tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas residual asumsi model regresi yang mengharuskan data terbebas dari masalah heteroskedastisitas terpenuhi.

Uji Signifikansi

Hasil uji regresi pengaruh infrastruktur jalan, infrastruktur Pendidikan, infrastruktur Kesehatan dan infrastruktur telekomunikasi terhadap tingkat kemiskinan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi

Variabel Dependen : Tingkat kemiskinan				
Variabel Independen	Koefisien	t-Statistik	Prob.	Keterangan
C	26,30299	60,20754	0,0000	-
Inf jalan	-0,516547	-4,126048	0,0091	Signifikan
Inf pendidikan	0,112380	1,044468	0,3441	Tidak Signifikan
Inf kesehatan	0,011792	0,394687	0,7993	Tidak Signifikan
Inf telekomunikasi	-0,582186	0,973347	0,0105	Signifikan
<i>R-square</i>		-3985471	F-Statistik	45,64871
<i>Adjusted R-square</i>	0,952024		Prob(F-Statistik)	0,000398
= 5%				

Sumber: Hasil Output Eviews, 2023

Koefisien Determinasi R-Square (R^2)

Berdasarkan hasil regresi diatas, nilai R-square dalam penelitian ini sebesar 0.973347 atau sebesar 97,33%, sedangkan sisanya 2,67% dijelaskan oleh variable lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji F

Untuk menguji hipotesis pengaruh simultan atau keseluruhan dari variabel independen (X) terhadap variable dependent (Y) digunakan uji F-statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai prob (F-statistic) 0.000398 dimana nilai ini lebih kecil dari α 0.05. Angka tersebut menunjukkan bahwa variable independen (infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur telekomunikasi) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Uji T

Untuk mengetahui pengaruh dari masing variable independent terhadap variable dependent secara parsial digunakan uji T-statistik. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh singnifikansi atau tidaknya variabel independen terhadap variable dependent. Kriteria pengujian parsial adalah Ketika nilai probabilitas lebih kecil dari α 0.05 (P-Value < 0,05 maka variable berpengaruh signifikan, begitu pula sebaliknya.

1. Nilai t hitung untuk infrastruktur jalan sebesar -4,126048 dengan probabilitas sebesar 0.0091 signifikan pada $\alpha = 0,005$. Jadi dapat diketahui bahwa infrastruktur jalan berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Nilai t hitung untuk infrastruktur Pendidikan sebesar 1,044468 dengan probabilitas 0,3441 signifikan pada $\alpha = 0,005$. Jadi diketahui bahwa infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Nilai t hitung untuk infrastruktur kesehatan sebesar 0,394687 dengan probabilitas 0,7993 signifikan pada $\alpha = 0,005$. Jadi diketahui bahwa infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.
4. Nilai t hitung untuk infrastruktur Telekomunikasi sebesar -3985471 dengan probabilitas 0,0105 signifikan pada $\alpha = 0,005$. Jadi dapat diketahui bahwa infrastruktur telekomunikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara

Berdasarkan hasil analisis, variable infrastruktur jalan memiliki nilai koefisien beta sebesar -0,516547 dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas 0.0091 < 0.05, yang artinya bahwa menolak H_0 dan menerima H_a , dengan kata lain Infrastruktur Jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. Nilai koefisien beta infrastruktur jalan sebesar -0,516547 ini menjelaskan bahwa jika pertumbuhan pembangunan infrastruktur jalan untuk menghubungkan ohoi dengan ibu kota kecamatan/kabupaten tumbuh sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi 25,79 persen yang diperoleh dari 26,30 persen nilai konstanta (C) dikurangi nilai koefisien beta infrastruktur jalan 0,5165 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tidak berpengaruh atau tetap.

Pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan ohoi ke ibu kota kecamatan/kabupaten sebagai pusat pertumbuhan berkontribusi terhadap penurunan biaya hidup, penciptaan lapangan kerja, peningkatan mobilitas orang dan barang yang pada akhirnya

meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara.

Pengaruh negatif dan signifikan yang diperoleh dari hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamco (2015) yang menyatakan bahwa, infrastruktur jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil ini juga mengonfirmasi hasil penelitian Annisa (2016) yang menunjukkan bahwa jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di desa-desa Kawasan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur.

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara

Berdasarkan hasil analisis, variable infrastruktur Pendidikan memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,112380 dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0,3441 > 0.05, artinya bahwa menerima H_0 dan menolak H_a dengan kata lain infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Infrastruktur Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara diduga karena mudahnya ketersediaan akses terhadap pendidikan formal di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini ditunjukkan dengan hampir semua ohoi/desa terdapat SD yang dilengkapi perpustakaan selama kurun waktu periode analisis. Fasilitas Pendidikan disediakan berdasarkan kewajiban pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Purnomo dkk (2021) yang menyatakan bahwa infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat melihat pengaruh infrastruktur pendidikan terhadap kemiskinan atau dengan kata lain tidak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian Franata Dkk. (2017) Juga menyataka bahwa Pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan bilamana Sebagian besar penduduk bekerja disektor informal yang tidak membutuhkan pendidikan yang pasti, sehingga meskipun tingkat pendidikan masyarakat tinggi, pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak terlalu banyak meningkat.

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara

Berdasarkan hasil analisis, variable infrastruktur kesehatan yang diwakili dengan pertumbuhan pembangunan gedung puskesmas dan rumah para medis menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,011792 dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0,7993 > 0.05, artinya bahwa menerima H_0 dan menolak H_a , dengan kata lain infratruktur Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini diduga karena infrastruktur kesehatan yang mendukung peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara tersedia cukup memadai. Setiap PUSKESMAS dilengkapi Rumah Medis/Paramedis yang membuat tenaga kesehatan selalu berada ditempat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sama halnya dengan bidang pendidikan, pada bidang kesehatan infrastruktur kesehatan disediakan dalam rangka memenuhi kewajiban pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan sebagaimana ditetapkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penelitian ini mengonfirmasi juga hasil peneitian yang dilakukan oleh Annisa (2016) yang menemukan bahwa layanan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap

kemiskinan. Hal ini diduga karena jumlah layanan kesehatan di Pedesaan Kawasan JLS sudah tersedia rata-rata 3 unit tiap desa, serta kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan telah didukung penuh oleh pemerintah. Hal ini terbukti bahwa hampir seluruh rumah tangga masyarakat desa di Kawasan Selatan telah memperoleh bantuan kartu jamkesmas.

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara

Berdasarkan hasil analisis, variable infrastruktur telekomunikasi yang diwakili oleh pertumbuhan ohoi akses telepon seluler menunjukkan nilai koefisien beta sebesar $-0,582186$ dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah dengan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0105 < 0,05$, artinya bahwa menolak H_0 dan menerima H_a , atau dengan kata lain infrastruktur telekomunikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Nilai koefisien beta infrastruktur telekomunikasi sebesar $-0,582186$ ini menjelaskan bahwa jika pertumbuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tumbuh sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi 25,72 persen yang diperoleh dari 26,30 persen nilai konstanta (C) dikurangi nilai koefisien beta infrastruktur jalan $0,5822$ persen dengan asumsi faktor lain dianggap tidak berpengaruh atau tetap.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara, dengan terkoneksinya jaringan telepon seluler dengan ohoi-ohoi terutama ohoi-ohoi di Pulau Kei Besar sangat membantu pelaku usaha mikro untuk meningkatkan pendapatan usaha karena kemudahan memasarkan hasil usahanya lewat media sosial, baik hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta usaha minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO) yang dipasarkan sampai ke wilayah Papua dan Kabupaten lainnya di Provinsi Maluku. Pendapatan usaha mikro yang meningkat sudah tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara.

5. Penutup

Penelitian ini berisikan suatu model yang menguji pengaruh manajemen mutu terpadu terhadap proses bisnis internal dan keunggulan bersaing. Hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa :

- 1). Variabel Infrastruktur Jalan (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Daerah (Y) di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian t-statistik yang menunjukkan nilai koefisien sebesar $-4,126048$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,0091$, yang artinya menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya jika pertumbuhan pembangunan infrastruktur jalan untuk menghubungkan ohoi dengan ibu kota kecamatan/kabupaten tumbuh sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi 25,79 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tidak berpengaruh atau tetap..
- 2). Variabel Infrastruktur Pendidikan (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Daerah (Y) di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian t-statistik yang menunjukkan nilai koefisien sebesar $1,044468$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,3441$, yang artinya menerima H_0 dan menolak H_a . Infrastruktur Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara diduga karena mudahnya ketersediaan akses terhadap pendidikan formal di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini ditunjukkan dengan hampir semua ohoi /desa terdapat SD yang dilengkapi perpustakaan selama kurun waktu periode analisis. Peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dalam rangka menunjang pelayanan pendidikan sesuai SPM Bidang pendidikan.

- 3). Variabel Infrastruktur Kesehatan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Daerah (Y) di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian t-statistik yang menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,7993 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0105, yang artinya menerima H₀ dan menolak H_a. Hal ini diduga karena infrastruktur kesehatan yang mendukung peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara tersedia cukup memadai.
- 4). Variabel Infrastruktur Telekomunikasi (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Daerah (Y) di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian t-statistik yang menunjukkan nilai koefisien sebesar -3985471 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0105, yang artinya menolak H₀ dan menerima H_a. Nilai koefisien beta infrastruktur telekomunikasi sebesar -0,582186 ini menjelaskan bahwa jika pertumbuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tumbuh sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi 25,72 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tidak berpengaruh atau tetap.

Daftar Pustaka

- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Ahmad, B., & Bonso, H. (2020). Peran Lembaga Pendidikan Nonformal Dalam Menangani Kemiskinan Di Era Milenial (Studi Kasus Loka Latihan Kerja Ukm Kabupaten Biak Numfor). *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(2), 114–123.
- Ali, M. M. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian. *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd*, 1(2), 1–5.
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(1).
- Dewi, D. K., Soemitro, R. A. A., Suprayitno, H., & Budianto, H. (2020). Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus di Ruas Jalan MERR Surabaya. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(3).
- Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Governance*, 1(2).
- Febriana, D. T., & Nurdiansyah, N. (2021). Meningkatkan Produktivitas dalam Kegiatan Belajar dan Kesadaran Hukum dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(42), 55–71.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasrillah, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2021). Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program BPJS Kesehatan (Studi pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2869–2882.
- Iriyena, P., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. J. (2019). Analisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kaimana 2007-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86–103.
- Laros, M. S. S. F. S., & Tuhuteru, D. I. N. D. H. (2022). *Kurikulum Pendidikan Karakter*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92.

- Mustari, M. (2023). *Teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pendidikan*. Sunan Gunung Djati Publishing.
- Okta Sriwahyuni, R. (2021). *Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Batang Bayang Di Kabupaten Pasaman Barat*. Universitas Andalas.
- Pane, N., Sembiring, S. D. B., & Unsa, I. (2020). Pengaruh pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera utara. *Jurnal Sekolah PGSD FIP UNIMED*, 4(2), 172–182.
- Purba, M. M. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Bidang Industri Otomotif. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 6(1), 160–170.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10(2), 121–130.
- Siwu, H. F. D. (2019). Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(6).
- Sulis, S. (2022). *PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013-2019 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 2.